

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PAM Jaya Dinilai Belum Mampu Ambil Alih Pengelolaan Air

Keputusan DKI untuk melanjutkan skema privatisasi dikecam.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Badan usaha milik daerah Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) dinilai belum mampu mengambil alih langsung pengelolaan air minum yang sudah 20 tahun berada di bawah kendali dua perusahaan swasta, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Anggapan inilah yang mendorong pemerintah DKI melanjutkan kontrak dengan kedua perusahaan swasta tersebut.

Menurut anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, Bambang Harymurti, PAM Jaya memerlukan sejumlah persiapan dan masa transisi sebelum menjadi operator utama pengelolaan air minum di Ibu Kota. "Memang butuh proses. Dua swasta ini masih diberi peran, tapi kendali ada di PAM Jaya," kata Bambang. Selanjutnya, akan ada perjanjian kerja sama baru di antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pengelolaan air minum oleh Palyja dan Aetra tidak efektif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berniat mengakhiri perjanjian yang masih berlaku hingga 2023, dan menyerahkan kembali pengelolaan air minum kepada PAM Jaya.

Tapi belakangan sikap DKI berubah. Dengan alasan PAM Jaya belum sanggup mengambil alih pengelolaan air, kontrak dengan Palyja dan Aetra akan diteruskan. Padahal, sejak pengumuman rencananya tersebut, awal Maret 2019, PAM Jaya sudah melakukan berbagai persiapan, seperti pendataan aset, pembangunan sistem keuangan, hingga mekanisme penagihan kepada pelanggan.

Pada saat ini, PAM Jaya diminta membuat *head of agreement* (HOA) atau induk perjanjian dengan Palyja dan Aetra sebagai dasar untuk melakukan revisi perjanjian kerja sama. Setelah penandatanganan HoA, Pemprov DKI Jakarta akan memimpin proses audit dan renegotiasi perjanjian kerja sama.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Ruslan Amsyari, mengatakan Dewan setuju rencana Pemprov menyerahkan tata kelola air minum kepada PAM Jaya. Namun, menurut dia, pemerintah harus tetap menagih kewajiban Aetra dan Palyja yang belum tuntas sebelum membentuk perjanjian baru.

Dia mengatakan, jika PAM Jaya menjadi operator tunggal pengelolaan air minum, Dewan akan lebih mudah menyetujui pemberian dana penyertaan modal daerah (PMD).

Pada tahun ini, DPRD

hanya memberikan suntikan PMD kepada PAM Jaya sebesar Rp 385 miliar untuk memperluas layanan air. Sebelumnya, Dewan pernah mencoret permohonan PMD PAM Jaya pada APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 1,2 triliun yang antara lain direncanakan untuk penguatan jaringan air, pembangunan pipa retikulasi di wilayah barat dan utara Jakarta, dan program lainnya.

Sebagian besar legislator menilai posisi PAM Jaya tak terlalu kuat dalam pelaksanaan program karena masih harus meminta Palyja dan Aetra untuk mengerjakan semua proyek. "PAM Jaya cuma sebagai pencatat. Dewan tak akan percaya memberikan dana besar kalau sistemnya masih seperti sekarang," kata Ruslan.

Namun, Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang, mengklaim perusahaannya sanggup menjadi operator utama pengelolaan air minum di DKI Jakarta. "Seluruh persiapan telah dimulai," katanya. Menurut dia, seluruh sistem dan proses transisi pengelolaan air minum akan tertuang dalam HoA dan perjanjian kerja sama yang baru.

"Konsepnya sudah masuk semua. Tinggal tunggu diumumkan saja (oleh Anies Baswedan)," kata Priyatno.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta memprotes keputusan DKI. Mereka

menganggap restrukturisasi kontrak tak ada bedanya dengan kontrak kerja sama yang saat ini berlaku. "Pengelolaan air harus oleh negara," kata kuasa hukum Koalisi, Arif Maulana.

● GANGSAR PARIKESIT

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PAM Jaya Dinilai Belum Mampu Ambil Alih Pengelolaan Air

Temuan Kerugian di Dua Lembaga Audit

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan pada 2016 PAM Jaya menderita kerugian sebesar Rp 1,26 triliun akibat kontrak kerja sama privatisasi air sejak 1998. Selain itu, ekuitas negatif PAM Jaya tercatat Rp 945,8 miliar. "Perjanjian kerja sama tersebut tidak menguntungkan PAM Jaya," demikian tertulis dalam laporan evaluasi yang diterbitkan BPKP pada 22 Juni 2017.

Menurut laporan hasil evaluasi tersebut, PAM Jaya juga harus membayar kewajiban *shortfall*—selisih biaya produksi dan penerimaan—kepada Palyja sebesar Rp 266,5 miliar dan Aetra Rp 173,8 miliar. Meski demikian, berdasarkan catatan BPKP, kinerja PAM Jaya termasuk kategori baik dengan nilai 63,81.

Temuan kerugian akibat kontrak privatisasi air juga menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa laporan keuangan PAM Jaya pada 2015 dan semester I 2016. Auditor menemukan kerugian sekitar Rp 1,4 triliun serta ekuitas negatif senilai Rp 1,06 triliun yang terakumulasi sejak kerja sama penswastaan terjalin pada Februari 1998-31 Desember 2015. Berikut ini beberapa temuan lain auditor negara itu.

- Pengakuan ihwal beban imbalan air (*water charge*) Palyja oleh PAM Jaya belum diyakini kesesuaiannya dengan nilai yang seharusnya dibayar.
- Pengakuan ihwal *shortfall* antara PAM Jaya dan Aetra per 30 Juni 2016 berselisih Rp 4,8 miliar.
- Terdapat kekurangan penerimaan denda ketidaktercapaian target Palyja pada 2015 senilai Rp 2,4 miliar.
- Ada penarikan dana *unshared revenue* oleh Aetra dan Palyja tanpa verifikasi PAM Jaya.
- Ada pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan atas tunjangan perumahan dan hari raya senilai Rp 1,1 miliar.
- Pemberian penghargaan produktivitas kepada direksi, badan pengawas, dan pegawai PAM Jaya tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 6,4 miliar.

● SUMBER: BPK DKI JAKARTA DAN BPKP DKI